

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 30  
AKUNTANSI DANA CADANGAN

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.***

## **PENDAHULUAN**

### **Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana cadangan dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.
2. ***Perlakuan akuntansi dana cadangan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dana cadangan.***

### **Ruang Lingkup**

3. ***Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam akuntansi dana cadangan Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.***
4. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.

## **DEFINISI**

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (3PN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
8. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
9. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

## **KLASIFIKASI DANA CADANGAN**

10. *Dana cadangan diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan klasifikasi organisasi.*

11. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

## **PENGAKUAN**

12. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

13. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.

14. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

15. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

16. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

## **PENGUKURAN**

17. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

18. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

## **PENYAJIAN**

19. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.

20. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.

21. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

## **PENGUNGKAPAN**

22. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- (b) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- (c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- (d) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan
- (e) ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- (f) Sumber Dana Cadangan; dan
- (g) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

23. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.

24. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

25. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

26. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

#### **TANGGAL EFEKTIF**

***27. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022.***